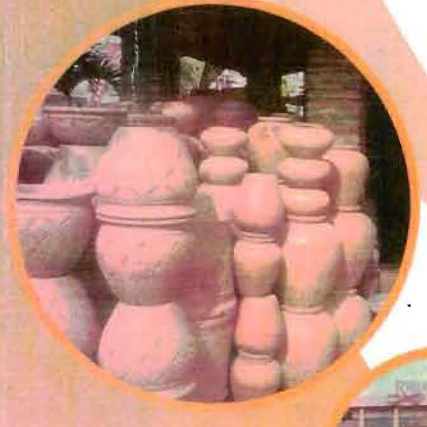




PENELITIAN PENGEMBANGAN KOMODITAS/PRODUK/JENIS USAHA UNGGULAN UMKM KOTA MALANG 2012











Kerja sama
Universitas Negeri Malang dengan Bank Indonesia

PENELITIAN PENGEMBANGAN KOMODITAS/PRODUK/JENIS USAHA UNGGULAN UMKM KOTA MALANG

LAPORAN HASIL PENELITIAN

KERJASAMA

BANK INDONESIA

DAN

TIM PENELITI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

MALANG
2012

RINGKASAN

PENELITIAN PENGEMBANGAN KPJU UMKM KOTA MALANG 2012

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis, tercermin dari berbagai data yang mendukung eksistensi UMKM dalam perekonomian Indonesia cukup dominan menghadapi krisis. Data Kementrian Negara Koperasi & UKM tahun 2011 menyebutkan bahwa jumlah industri UMKM terdapat dalam setiap sektor ekonomi dan tercatat sebanyak 51,3 juta unit atau setara 99,91% dari total usaha. UMKM berpotensi besar menyerap tenaga kerja sebesar 97,04 % dari total angkatan kerja yang bekerja. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB sebesar 55,56 % dari total PDB.

Bank Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM melakukan penelitian tentang UMKM yang dapat dipergunakan sebagai informasi untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan memperoleh KPJU Unggulan maupun potensial untuk kepentingan *stakeholders,* baik pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luas dalam upaya pemberdayaan UMKM.

Penelitian KPJU dimaksudkan untuk mengenal dan memahami profil daerah, profil UMKM, kebijakan Pemerintah dan peranan Perbankan dalam pengembangan UMKM, memberikan informasi tentang KPJU unggulan, memberikan informasi permasalahan yang timbul dari masing-masing KPJU unggulan, KPJU potensial, memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pihak perbankan dalam rangka pengembangan KPJU unggulan.

Penelitian KPJU dilaksanakan di 5 kecamatan di Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian KPJU ditemukan lima KPJU Unggulan, lima KPJU potensial dan permasalahan yang dihadapi oleh KPJU Unggulan sebagai berikut:

KOMODITAS UNGGULAN KOTA MALANG
Keripik Tempe
Rumah Kost
Keramik
Gerabah
Hotel dan Losmen

KOMODITAS POTENSIAL KOTA MALANG
Sanitair
Pabrik Rokok
Sayur Organik
Singkong
Lele

PERMASALAHAN KPJU UNGGULAN KOTA MALANG

PRODUK	KERIPIK TEMPE	RUMAH KOST	KERAMIK	GERABAH	HOTEL DAN LOSMEN
MASALAH YANG DIHADAPI	• Keterbatasan Modal • Harga bahan baku mahal	• Administrasi • Perijinan • Pajak	• Banyak pengrajin alih profesi • Kurang lahan parkir • Kurang modal • Kurang promosi	• Kurang Modal • Persediaan bahan baku terbatas • Persaingan sangat ketat	• Persaingan usaha

REKOMENDASI KEBIJAKAN

KOTA MALANG

- Pelatihan standar produk, pemasaran dan pengemasan
- Mengusahan kerjasama Asosiasi Pengusaha Keripik Tempe dengan PHRI
- Pembentukan kelompok/koperasi dalam pengadaan bahan baku
- Pameran produk dalam/luar negeri
- Pembentukan kampung wisata
- Perbaikan sarana parkir

PERAN PERBANKAN

- Dalam mendorong pertumbuhan UMKM, bank menyalurkan kredit UMKM antara lain Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, Kredit Usaha Pembibitan Sapi, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Usaha Mikro, Kredit Modal Kerja
- Perbankan diharapkan dapat meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan pemerintah melalui sosialisasi produk perbankan bagi UMKM dan komunikasi

PERAN PEMERINTAH

- Kebijakan pemerintah seharusnya lebih banyak dikoordinasikan antar sektor agar dapat terjalin hubungan baik antar sektor
- Melakukan koordinasi guna mencari solusi permasalahan dalam upaya meningkatkan potensi dan prospek UMKM sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN i
EXECUTIVE SUMMARY iii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Penelitian 3
1.3 Ruang Lingkup Penelitian 4
1.4 Hasil yang Diharapkan 5

BAB II METODOLOGI 6
2.1 Daerah Penelitian 6
2.2 Jenis dan Sumber Data 6
2.3 Teknik Pengumpulan Data 6
2.4 Analisis Data 7
2.5 Penentuan KPJU Tingkat Kecamatan 8
2.6 Penentuan KPJU Tingkat Kabupaten/Kota 8

BAB III TINJAUAN WILAYAH 10

BAB IV HASIL PENELITIAN 11
4.1 Penetapan KPJU Unggulan Kecamatan 11
4.2 Penetapan KPJU Unggulan Kota 11
4.3 Penetapan KPJU Unggulan dan Potensial Kota 12

BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 14
5.1 KPJU Unggulan di Kota Malang 14
5.2 Peranan Perbankan Dalam Pengembangan UMKM 17
5.3. Analisis SWOT Tiap Sektor Di Masing-masing Kota 17
5.4. Potensi dan Prospek KPJU Potensial Serta Kebijakan Untuk Mendukung KPJU Potensial 21

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 25
6.1 Kesimpulan 25
6.2 Rekomendasi Kebijakan 26

DAFTAR PUSTAKA 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis, tercermin dari berbagai data yang mendukung eksistensi UMKM dalam menghadapi krisis ekonomi Indonesia. Data dari Kementrian Negara Koperasi & UKM tahun 2011 menyebutkan bahwa jumlah industri UMKM terdapat dalam setiap sektor ekonomi dan tercatat sebanyak 51,3 juta unit atau setara 99,91% dari total usaha. UMKM berpotensi besar dalam menyerap tenaga kerja sebesar 97,04 % dari total angkatan kerja yang bekerja. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB sebesar 55,56 % dari total PDB.

Dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia memiliki kebijakan dari sisi permintaan (*Demand Side*) dan penawaran (*Supply Side*). Kebijakan *Demand Side* merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan eligibilitas dan kapabilitasnya sehingga *bankable* yang meliputi penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan kerjasama dengan lembaga internasional dan Pemerintah. Kebijakan *Supply Side* merupakan kebijakan yang difokuskan pada berbagai kebijakan dan program untuk membantu bank dalam menyalurkan kredit kepada UMKM yang meliputi pengaturan kepada perbankan, penguatan kelembagaan dan penyediaan dana secara tidak langsung melalui penerbitan SUP No.005 dan dana *relending*. Kebijakan dari sisi permintaan berupa penelitian dimaksudkan dalam rangka pemberian informasi yang dapat digunakan dalam mendorong pertumbuhan UMKM, informasi kepada *stakeholders,* baik kepada pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta,dan masyarakat luas.

Bank Indonesia sejak lama mengembangkan penelitian *Baseline Economic Survey* (BLS) yang bertujuan mengidentifikasi berbagai peluang investasi di daerah yang bermuara pada pemberian informasi potensi ekonomi suatu daerah. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2006,

penelitian BLS lebih diarahkan kepada penelitian pengembangan potensi ekonomi daerah yang memberikan informasi kepada *stakeholders* mengenai Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) potensial untuk menjadi unggulan daerah yang dapat dikembangkan terutama terhadap UMKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di daerah.

Data dan informasi dalam Penelitian Pengembangan KPJU Unggulan UMKM meliputi aspek makro berupa kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan potensi ekonomi daerah dalam rangka pengembangan UMKM. Sementara pada aspek mikro, meliputi kondisi dan potensi UMKM. Hasil penelitian tersebut akan didiseminasikan dalam *website* Sistem Informasi Terpadu Pengembangan UKM (SI-PUK) yang terintegrasi dalam Data dan Informasi Bisnis Indonesia (DIBI), dan dapat diakses melalui internet di alamat **www.bi.go.id**.

Metode Penelitian Pengembangan KPJU UMKM ini menggunakan Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang dimodifikasi. Penelitian ini menggunakan Metode Bayes dan Metode Borda dalam menetapkan KPJU unggulan kecamatan dan kabupaten/kota. Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan tiap kabupaten/kota di suatu provinsi memiliki KPJU unggulan dari berbagai sektor ekonomi untuk dikembangkan yang dapat dilihat dari beberapa perspektif:

a. Perspektif *Product Life Cycle* (PLC)

   KPJU disebut unggulan dengan melihat tahap kematangan KPJU, dalam tahap *mature* karena saat ini unggul dibanding KPJU yang lain (meskipun kemungkinan besar akan mengalami *decline* setelah melewati fase *mature*), atau saat ini tidak terlalu unggul namun berpotensi besar unggul di masa depan (*fase growth*) yang dapat menimbulkan konsekuensi pada perspektif strategi pengembangan.

b. Perspektif Tujuan

   Dalam perspektif tujuan, penentuan KPJU unggulan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atau tujuan atau target yang ingin dicapai, dengan meyakinkan investor agar berinvestasi pada bisnis KPJU unggulan yang terpilih dengan jaminan *return* yang cepat, atau

dengan memberikan stimulus bagi usaha lemah namun berpotensi unggul di masa datang.

c. Perspektif Keberpihakan

Pemilihan KPJU unggulan dengan melibatkan unsur keberpihakan, pada pengusaha lokal.

d. Perspektif Skenario Kebijakan

KPJU disebut unggulan dengan melihat dari kondisi saat ini (*existing*) KPJU unggul dibanding dengan yang lain tanpa melihat ada kontradiksi dengan skenario kebijakan pemerintah normatif.

Berdasarkan keempat perspektif di atas, penelitian KPJU akan lebih fokus. sehingga Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan kebijakan ekonomi melalui pengembangan KPJU unggulan di suatu kabupaten/kota sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi angka/tingkat kemiskinan di daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

1.2. Tujuan Penelitian

a. Mengenal dan memahami mengenai:
   1) Profil daerah, meliputi: kondisi geografis, demografi, perekonomian dan potensi sumberdaya.
   2) Profil UMKM di wilayah penelitian termasuk faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan UMKM.
   3) Kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Daerah Tingkat I dan II) yang terkait dengan pengembangan UMKM.
   4) Peranan Perbankan dalam pengembangan UMKM.

b. Memberikan informasi tentang KPJU unggulan yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan di suatu kabupaten/ kota dan kecamatan dalam rangka:
   1) Mendukung pembangunan ekonomi daerah;
   2) Menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja

3) Meningkatkan daya saing produk.

c. Memberikan informasi dan permasalahan yang timbul dari masing-masing KPJU unggulan lintas sektoral di masing-masing kabupaten/kota, misalnya mengenai bahan baku, tenaga kerja, teknologi yang digunakan, produksi, kondisi permintaan, harga dan lokasi (kecamatan).

d. Memberikan informasi tentang KPJU potensial, yaitu KPJU yang saat ini belum menjadi unggulan namun memiliki potensi untuk menjadi unggul di masa datang apabila mendapatkan perlakuan atau kebijakan tertentu.

e. Memberikan rekomendasi berupa:
   1) KPJU unggulan yang perlu/dapat dikembangkan di masing-masing kabupaten/kota
   2) Peranan Perbankan dalam pengembangan KPJU unggulan
   3) Kebijakan kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dalam rangka pengembangan KPJU unggulan UMKM.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

a. UMKM dengan kategori sebagai unggulan daerah pada tingkat kabupaten/kota.

b. UMKM sebagaimana disebutkan dalam UU No.20 Tahun 2008
   1) Usaha Mikro
   2) Usaha Kecil
   3) Usaha Menengah

c. Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan yang mendukung perekonomian daerah antara lain:
   1) mampu menciptakan dan menyerap tenaga kerja
   2) mempunyai prospek yang baik
   3) berdaya saing tinggi.

4) Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Potensial lintas sektoral yang tidak masuk lima besar di tingkat kabupaten/kota yang dapat menjadi KPJU

unggulan apabila ada perlakuan atau kebijakan tertentu dengan penjelasan kelemahannya agar dapat diformulasikan perlakuan tertentu atau kebijakan yang perlu diambil agar KPJU potensial tersebut dapat berkembang menjadi KPJU unggulan.

5) KPJU pada setiap sektor/subsektor ekonomi, yang meliputi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan), pertambangan dan penggalian, perindustrian, perdagangan dan jasa-jasa

6) KPJU sampai dengan nama KPJU akhir (misalnya: padi sawah, kacang hijau, angkutan perkotaan).

1.4. Hasil yang Diharapkan

a. Laporan hasil penelitian KPJU unggulan di Kota Malang

b. Terjalinnya kerjasama multipihak dalam mendorong peningkatan usaha yang termasuk dalam KPJU unggulan di Kota Malang.

c. Menjadikan laporan KPJU unggulan Kota sebagai salah satu input dalam proses penyusunan rencana dan pengambilan kebijakan serta program pembangunan di Kota Malang.